

DAMPAK POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2024 MENDATANG

IMPACT OF IDENTITY POLITICS IN THE FUTURE 2024 GENERAL ELECTIONS

Andre Pebrian Perdana, S.I.P., M.I.P.¹, Muslih S.Hi, M.H.²

Fakultas Hukum Universitas Malahayati

¹andrepebrian@malahayati.ac.id, ²ustmuslih@malahayati.ac.id

Dikirim 12 Mei 2023, Direvisi 12 Juni 2023, Disetujui 28 Juli 2023

Abstrak : Politik identitas akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia menuju pemilihan presiden 2024 mendatang. Karena kondisi mental dan karakter masyarakat Indonesia belum terlepas dari sentimen primordialisme dan sektarianisme yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia sekalipun sudah hidup di era demokratisasi terbuka dan era digitalisasi modern. istilah politik identitas sudah lama dikonstruksi sebagai narasi politik oleh kelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai wacana instrumen untuk menggambarkan rasa kebencian dan ketakutan kalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan citra dan menyudutkan figur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang, bisa mengalahkan lawan lainnya sehingga perlu disudutkan dengan narasi tidak nasionalis dan intoleran. Politik Identitas pada dasarnya adalah situasi dan cara berpolitik yang mempersatukan kelompok karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan latar belakang golongan, contohnya suku, ras, agama, dan gender. Identitas bukan hanya soal sosiologis tetapi juga bisa masuk ke ranah politik. politik identitas dapat berpengaruh baik dan buruk dalam republik yang berbhinneka ini.

Kata Kunci: Dampak, Politik Identitas, Pemilihan Umum

Abstract : Identity politics will continue to be present in Indonesia's political narrative towards the upcoming 2024 presidential election. Because the mental condition and character of the Indonesian people have not been separated from the sentiments of primordialism and sectarianism which are still firmly rooted in the culture of Indonesian society even though they have lived in the open democratization era and the modern digitalization era. The term identity politics has long been constructed as a political narrative by certain political elite groups in Indonesia as an instrument discourse to describe feelings of hatred and fear of losing to their political opponents in order to reduce the image and corner certain figures who are usually considered strong and have the potential to win, can defeat other opponents. so it needs to be cornered with non-nationalist and intolerant narratives. Identity politics is basically a political situation and method that unites groups due to a sense of injustice and dissatisfaction based on the equality of group backgrounds, for example ethnicity, race, religion and gender. Identity is not only a sociological matter but can also enter the realm of politics. Identity politics can have both good and bad effects in this diverse republic.

Keywords: Impact, Identity Politics, General Elections

PENDAHULUAN

Indonesia masuk dalam Negara yang sudah merdeka dan wilayahnya yang sangat luas, sudah dipastikan memiliki identitas agar dapat dikenal dan menjadi pembeda dengan Negara lain. Identitas nasional bisa menjaga kelangsungan dan eksistensi hidup suatu Negara. Indonesia memiliki wibawa dan kehormatan selaku Negara yang setara

dengan Negara lain. Identitas nasional digunakan Indonesiasebagai jati diri Negara dari proses kebangsaan yang cukup panjang yaitusemenjak terjadinya masa penjajahan hingga sampai pada masakemerdekaan. Indonesia pada saat ini memangdikenal dengan negara yang bersifatmajemuk dan memiliki keanekaragamanterhadap suku, etnis, agama, ras, dan kebudayaan.

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia yang membuat seluruh individu yang harus bias beradaptasi antara satu sama lain. Keanekaragaman masyarakat Indonesia juga rawan terjadinya konflik maupun perselisihan terkait SARA, sehingga beberapa orang pun bisa terpengaruh dengan terjadinya konflik tersebut.

Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata untuk melakukan penegakan dan peningkatan pemahaman kembali nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar Negara, karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang plural, dan bangsa yang memiliki kemampuan serta daya tahan untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan Agama melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awalnya dibentuk dengan satu komitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang menyatukan segala perbedaan alamiah bangsa Indonesia, dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas di NTT (Nusa Tenggara Timur). Dialektika tentang komitmen dasar berbangsa yang satu telah dilakukan secara elegan melalui pendekatan rasionalitas dan emosionalitas, bahkan spiritualitas (kajian dan perenungan agama melalui ritualitas para ulama dan agamawan) bersama-sama para pemikir dan pejuang kemerdekaan. Keanekaragaman identitas suku bangsa, etnis, agama, hingga adat istiadat, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, namun bisa menjadi potensi persoalan jika perbedaan di dalamnya tidak berhasil dikanalisis dalam satu prinsip dasar kebangsaan yang mampu menjadi pijakan hidup bersama dalam suatu negara

bangsa yaitu NKRI (Indonesia untuk semua). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digali dari nilai-nilai luhur kebangsaan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada akar kebudayaan suku-suku bangsa yang mendiami Nusantara dan telah disepakati menjadi pondasi dasar berdirinya NKRI. Pancasila merupakan dialektika dari sistem dan konsep kebangsaan yang ada dalam sejarah dunia (demokrasi ala barat “liberalisme”, negara agama, monarki, juga sosialisme).

Politik identitas seharusnya dapat dilebur menjadi politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik karena politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik nasionalisme yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pengejawantahan dari politik kebhinekaan yang di dalamnya terikat keragaman tapi untuk kesatuan. Dibutuhkan kesepakatan untuk memastikan bahwa Indonesia adalah milik bersama, menghapus prinsip dominasi atas apapun, Kesetaraan dalam kemanusiaan, keamanan dan kesejahteraan umum bagi semua orang, kedamaian atas prinsip tepo seliro yang didasarkan kepada ideologi Pancasila yang akan memayungi keragaman dalam politik kebangsaan dan politik kenegaraan bagi seluruh warganegara tanpa ada labelisasi yang bernuansa SARA.

Kuatnya hasrat dalam kompetisi politik tidak lantas menguatkan paham-paham radikalisme sebagai gerakan politik bila peluang itu terbuka lebar dan tidak diantisipasi, maka paham dan kelompok radikalisme agama akan mengubah seluruh haluan dasar kenegaraan dan visi besar kebangsaan Indonesia. Fenomena itu berdampak pada faksionalisasi kelompok masyarakat yang tidak hanya terjadi di media sosial, namun menjalar hingga ke ruang publik menggunakan instrumen agama, suku, maupun menyinggung Pilkada 2017 yang terjadi di DKI Jakarta.

Saat itu politik identitas sangat kentara terjadi. Iklim politik itu turut dirasakan hingga ke ruang peribadatan yang seharusnya bisa steril dari kepentingan politik. Yang tak kalah penting, saat ini ekonomi global sedang dihadapkan dengan ancaman resesi ekonomi yang penuh dengan situasi ketidakpastian. Kondisi ini tentu turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024. Faktor lain adalah persiapan teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang tidak mudah dan kompleks di tahun yang sama akan digelar pilkada serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional juga berpotensi menjalar ke sejumlah daerah. Politik identitas dalam perspektif sosiologi akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia menuju pemilihan presiden 2024. Karena kondisi mental dan karakter masyarakat Indonesia belum terlepas dari sentimen primordialisme dan sektarianisme yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia sekalipun sudah hidup di era demokratisasi terbuka dan era digitalisasi modern. Istilah politik identitas sudah lama dikonstruksi sebagai narasi politik oleh kelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai wacana instrumen untuk menggambarkan rasa kebencian dan ketakutan kalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan citra dan menyudutkan figur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang, bisa mengalahkan lawan lainnya sehingga perlu disudutkan dengan narasi tidak nasionalis dan intoleran. Politik identitas selalu dilabelkan pada tokoh-tokoh Islam pada hal agama lain juga melakukan hal yang sama, bahkan politik kesukuan itu juga politik identitas misalnya isu harus orang Jawa, harus orang Sumatra, harus orang Sulawesi dan seterusnya, itu semua adalah bagian dari politik identitas yang etnisitas primordialisme. Isu politik identitas sengaja di tiupkan terus oleh kelompok tertentu yang ketakutan kalah dan tidak senang Islam bersatu, inilah politik adu domba antar umat yang tidak produktif dan merusak semangat demokrasi. Munculnya

isu politik identitas itu juga tidak lepas dari upaya untuk mengkreditkan kelompok Islam tertentu, karena isu politik identitas dinilai sangat ampu untuk melumpuhkan rival politik, upaya elit politik tertentu dengan motif niat jahat untuk membongsa popularitas dan ke terpilih tokoh kandidat lawan tanding yang di nilai sangat kuat dan mendapat simpati masyarakat luas terutama pemilih terbesar umat Islam. politik di Indonesia tidak lepas dari politik identitas, sebab politik selalu membutuhkan instrumen atau kendaraan media untuk menyatakan diri lewat identitas seperti agama, suku, ras, kelompok, identitas budaya, paham ideologi, organisasi dan komunitas primordial lainnya. Maka kalau pengertian politik identitas ini kita sepakati maka semua elit politik Indonesia dan pekerja politik masuk kategori pengguna politik identitas.

Ketika kelompok PKI menyatakan diri ikut dalam arena politik Indonesia maka sesungguhnya itu juga masuk kategori politik identitas, karena gerakan politiknya mengajak kelompoknya untuk bersatu dalam identitas paham komunis atau yang sehaluan dengan pemikiran sosialis untuk memilih sesama anggotanya, begitu juga ketika ormas Islam dan partai Islam mengkampanyekan pentingnya menyatukan pilihan politik umat Islam kepada tokoh elit Islam maka itu juga politik identitas, yang sering dilabelkan memakai politik identitas, walaupun banyak ulama setuju dengan politik identitas yang menawarkan doktrin dan ideologi Islam sebagai alat perjuangan pemersatu umat dan bangsa sebab umat Islam Indonesia paling besar sahamnya dalam kemerdekaan Indonesia. Sehingga, fenomena politik identitas ini memberikan dampak yang besar terhadap berbagai dinamika sosial-politik dengan munculnya berbagai kelompok pergerakan sosial. Fenomena menguatnya permasalahan politik identitas ini, bukan hanya menjadi salah satu isu lokal, melainkan telah menjadi salah satu isu nasional hingga isu internasional.

METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Apakah Politik Identitas Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI ?; (2) Apakah faktor yang dapat memunculkan politik identitas pada pemilihan Presiden Tahun 2024?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku , agama , ras serta budaya. Di negeri yang terletak di garis Khatulistiwa ini , Indonesia banyak menyimpan berbagai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya , agama serta suku yang berbeda-beda , kerap kali bangsa ini di hadapkan pada satu kondisi dimana persatuan berada diujung tanduk. Solusinya , mencari satu pegangan yang mana bisa dijadikan sandaran untuk mempersatukan banyak masyarakat dan juga kepentingan didalamnya. Maka dari itulah lahir semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Seiring berjalanya waktu , persatuan Indonesia banyak menghadapi ancaman, entah ancaman eksternal maupun internal. Sejak kemerdekaan, bangsa ini sudah mengalami 2 kali invasi militer oleh Belanda, pemisahan diri oleh Timor Timor, konflik separatis diberbagai wilayah , dan kondisi politik dalam negeri kita.

Menurut Richard Jenkins, identitas merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Hanya dengan membedakan identitas kelompok yang berbeda bahwa orang dapat mengkategorikan kepada orang lain. Identitas pada awalnya berkembang sebagai hasil dari proses kategorisasi. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing obyek. Ketika dilakukan

dalam konteks sosial maka proses kategorisasi sosial (pengelompokkan masyarakat berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki bersama oleh suatu kumpulan individu) akan terjadi dalam kondisi sang subjek (individu perilaku kategorisasi) sendiri berada dalam kategorisasi tersebut.(Nasrullah Riyanto, Proses Pembentukan Identitas Sosial Masyarakat Eropa: Sebuah Pendekatan Psikologi Politik, (Tesis S2 UI: Jakarta, 2006), h. 40.) Politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas , di Indonesia sendiri politik identitas kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Saya tidak akan membahas mengapa bisa terbagi menjadi dua kelompok seperti diatas , namun saya akan membahas bagaimana dampak dari politik Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara. Pertentangan antara kedua-dua identitas tersebut dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki political will dalam menengahi isu ini. Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan melainkan juga kepentingan masyarakat luas, sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan. Sebagai contoh , masa penjajahan dulu kita mampu bersatu sebab kita memiliki satu identitas , yakni bangsa Indonesia , kita mampu melawan penjajah karena dilandasi semangat persatuan tersebut , namun , jika salah mengelola , maka politik identitas akan membuat masyarakat terpecah belah seperti saat Pilkada DKI. Yang mana sampai saat ini pun masyarakat semakin terkotak-kotak dan terbagi tidak hanya dalam kehidupan perpolitikannya namun juga sosial dan budayanya. Dibiarkan terus menerus akan mengoyak stabilitas bangsa. Dan ini cukup disayangkan mengingat perbedaan yang

kita miliki sejatinya pernah menjadi kekuatan kita, saat ini malah menjadi senjata yang menghancurkan kita dari dalam bangsa kita sendiri.

Politik Kebangsaan Pancasila yang bersifat multikultur secara konseptual memiliki makna sebagai anti tesis dari praktik politik identitas yang bersifat partikularistik. Politik *divide et impera* (pecah belah) yang pernah digunakan oleh kaum kolonial Belanda pada sejarah perjuangan kemerdekaan tidak lain adalah menggunakan pola-pola dan metode praktik politik identitas sebagai cara efektif melemahkan kekuatan nasional untuk melawan kaum kolonial saat itu. Demikian pula di dalam sejarah konflik-konflik politik aktual di dunia, konflik atas politik identitas terjadi di berbagai bangsa. Jejak jejak konflik atas dasar politik identitas dapat kita pelajari di beberapa negara Eropa dan Asia seperti di Skotlandia antara Katolik melawan Protestan sebagai bagian dari konflik di wilayah Great Britania. Perang saudara di Amerika Serikat ketika terjadi pada era Civil War, konflik pribumi dan non-pribumi di Semenanjung Malaya, pecahnya Yugoslavia, Suriah, Afghanistan, maupun politik anti Semit serta merebaknya terorisme, radikalisme di berbagai belahan dunia. Politik identitas dilebur menjadi politik kebangsaan yang tidak lagi mengedepankan egoisme sektoral, egoisme kelompok, egoisme partikularistik. Tidak terlalalu berlebihan jika pada akhirnya akan muncul “kecurigaan” kala penyebaran virus politik identitas sebagai bentuk strategi global untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang dianggap akan mengancam eksistensi dominasi sosial, politik dan ekonomi mereka.

Politik identitas hanya akan membuat masyarakat terpecah belah karena rentan terjadi konflik akibat menyangkut isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Politik identitas akan mengelompokkan

masyarakat menjadi dua bagian dan menjatuhkan lawan dengan hal yang berkaitan dengan identitas, dengan inisialnya masing-masing, sebagai strategi yang efektif dan sangat bersifat emosional untuk mendapatkan suara terbanyak model politik seperti itu, lanjutnya, lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang didasarkan pada kesamaan identitas, seperti agama, gender, dan budaya. Model politik identitas tersebut, menurutnya, dapat memicu konflik dan bahaya laten di kalangan masyarakat, apabila dibiarkan terus menerus dan tidak diintervensi dengan narasi positif. Relasi antarumat beragama akan terpecah yang pada akhirnya mengancam kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Politik identitas dengan mengatasnamakan isu agama, katanya, biasanya mengutamakan kepentingan politik yang dibumbui dengan berbagai ayat dan simbol-simbol agama. Bagi para pendengarnya, hal itu dirasa berbau surgawi, sehingga mengakibatkan mereka yang terpengaruh tidak merasakan bahaya mengancam bagi diri mereka. Model pendekatan politik seperti ini, lambat atau cepat, akan mencederai dan mengkotak-kotakkan masyarakat; yang akhirnya merusak tatanan hidup masyarakat. penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terbuai dengan narasi-narasi politik identitas.

Potret sejarah konflik politik atas dasar identitas tersebut menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan bangsa Indonesia bahwa persatuan dan kesatuan nasional dapat terpecah belah ketika politik identitas tidak dapat di kelola secara efektif, dikanalisaasi bahkan harusnya dicegah. Periode reformasi telah berjalan hampir dua dekade, yang telah membawa perubahan baik secara prosedur maupun substansi pada kualitas berdemokrasi. Namun, pesta demokrasi lokal pertarungan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu telah meninggalkan beberapa catatan

penting tentang fenomena kemunculan Politik Identitas yang akan problem mendasar dalam sistem demokrasi yang sedang kita tata bersama saat ini. Pada tahun 2019 ini, Indonesia telah melaksanakan Pemilu serentak yang untuk pertama kalinya dalam sejarah akan memilih Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan proses pemilihan wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD, DPD. Kegaduhan politik nasional telah diwarnai dengan merebaknya berbagai Isu-isu partikularistik tentang pribumi dan non pribumi, Islam dan non Islam, China vs anti China, Khilafah Islam vs Pancasila merebak dan menjadi lumrah dibahas, digagas, dihembuskan dalam kontestasi kekuasaan di daerah maupun nasional dengan dalih demokrasi. Politik negara dan kebangsaan berdasar ideologi Pancasila yang menjadi kesepakatan bangsa telah dinapikan demi kepentingan elektoral dalam usaha untuk meraup sentimen pemilih. Padahal, banyak sekali isu substansi lainnya yang seharusnya menjadi “Tema Sentral” untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang belum tuntas, lebih layak dan lebih elegan untuk dijadikan bahan perdebatan sebagai bentuk kritik atas realitas politik kenegaraan dan kebangsaan yang sangat mendesak untuk menjadi agenda. Mencertami bahaya disitegari bangsa tersebut, jelas semuanya terkait erat dengan masalah identitas. Apabila kondisi tersebut kembali dibangkitkan dengan adanya praktik-praktik Politik Identitas dalam setiap moment kehidupan politik kita, terutama dalam kontestasi politik di tingkat nasional maupun pada politik lokal sudah dapat dipastikan sulit menghindari terjadinya konflik politik yang pernah terjadi akan kembali menghantui perjalanan kehidupan politik berbangsa dan bernegara kita ke depan. Kita tidak boleh terjebak pada perang kap yang sama, hanya bangsa yang mau belajar dari sejarahnya yang akan menjadi bangsa besar dan bangsa yang kuat. Isu-isu yang menyertai jelang pelaksanaan Pemilu menunjukkan semakin

brutalnya klaim pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana cara memberi hukuman kepada yang lemah. Opini-opini menyesatkan disebar layaknya virus-virus yang siap menyerang kewarasan. Sisi universal kemanusiaan dicerabut demi mencapai hasrat kelompok. Kita seperti digiring untuk melupakan kodrat manusia yang dianugerahi identitas primordial yang personal sebagai bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil analisa sederhana atas beberapa teori dan fakta sosial politik yang terjadi, berikut merupakan ringkasan dari beberapa bahaya penyalahgunaan politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai negara Pancasila.

1) Mengancam Keutuhan NKRI

Saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Bukan hanya politik identitas, bahkan, saat ini ada kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa. Tentunya hal ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. Sangat ironis, kenapa pada Pemilu 2019 lalu muncul pihak-pihak yang mempersoalkan ideologi negara. Padahal dulu tidak ada, bahkan hingga era Orde Baru dan beberapa pemilu langsung di era reformasi hingga pemilu 2014 tidak ada yang mempersoalkan ideologi bangsa, pemahaman mengenai bahaya dari politik identitas di tengah masyarakat. Perlu diberikan sebab isu SARA itu menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya seperti contoh pelanggaran norma sosial dan contoh nilai Pancasila.

2) Menimbulkan Adu Domba/perpecahan

Sejatinya politik yang mengatasnamakan identitas akan dapat membawa dampak adu domba antara pihak satu dan lainnya. Terlebih lagi jika berkaitan dengan identitas baik isu

agama atau personal maka hal ini akan dirasa lebih sensitive. Karena politik identitas itu sejatinya kejam dan tajam karena bisa menjerumuskan mereka mereka kedalam jurang permusuhan yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

3) Ancaman Terhadap Pluralisme

Pluralisme (bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata plural (=beragam) dan isme (=paham) yang berarti paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme seringkali disalahartikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas), artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang dan/atau sekelompok orang.

4) Menimbulkan Polarisasi dan Pragmentasi kekuatan politik

Polarisasi isu pribumi dan non-pribumi juga tak bisa dianggap angin lalu. Memori kita masih segar mengingat kerusuhan yang menelan korban jiwa tak terperiikan di hari-hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-pribumi dikoaar-koarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah 'aseng'.

Padahal, jika masyarakat peduli literasi dan diberikan informasi yang proporsional, akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tak hanya dimiliki oleh satu suku atau ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap ngotot dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era homo erectus sejuta tahun

silam sebagaimana hukuman bagi pelanggaran ham ringan.

5) Membawa perselisihan/Konflik

Perselisihan soal agama dan klaim ketuhanan tentu tak akan pernah selesai. Bahkan, seorang yang mengaku atheis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal keberadaan Zat Ilahiah. Penjelasan yang sangat rasional dari Dostoevsky, "bila dinyatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan, menjadi jelaslah bahwa semua perbuatan apapun akan dibenarkan." Kalimat ini memberikan penjelasan bahwa kebenaran bisa hadir pada setiap kelompok, tapi yang berhak menentukan kebenaran universal hanya Tuhan. Artinya, untuk dimensi ketuhanan, bisa saja sekelompok orang memegang teguh kebenarannya, sama halnya dengan kelompok lain. Semua bisa benar, juga bisa salah. Sejatinya, jika benturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara, yang kuat yang akan menerkam yang lemah, dan yang banyak yang akan berkuasa.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, akibat adanya penyalahgunaan Politik Identitas (Islam), maka dibutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antara Islam dengan Pancasila adalah melalui upaya harmonisasi. Kiranya perlu kita pertimbangkan bersama gagasan yang telah disampaikan oleh Nasaruddin Umar mengupas tentang merajut harmoni Islam dan NKRI. Secara khusus memberikan penjelasan tentang harmoni Islam dan Pancasila, di mana menurutnya ada tiga konsepsi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi antara Pancasila dan Islam sebagai berikut:

Pertama, Menempatkan Pancasila sebagai "Melting Pot". Dalam kondisi objektif Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu (melting pot) yang menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan di dalamnya. Menurutnyanya harus adanya interaksi dinamis bukan indoktrinasi aktif dari penguasa dari realitas

nilai-nilai plural tadi sekaligus melahirkan sintesa dan konfigurasi budaya keindonesiaan yang unik. Budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat. Kedua, Melahirkan “Civil Society” untuk mewujudkan nilai-nilai islami sebagai konsekuensi polupalsi umat Islam yang menduduki posisi mayoritas mutlak. Bukannya mengedepankan legal formal sebagai negara Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab. Ketiga, Nasionalisme Terbuka. Keragaman bahasa, budaya hingga agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya melahirkan satu konsep yang disebut nasionalisme. Nasionalisme Indonesia dapat disebut nasionalisme terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak berserikat, hak beragama, hak berbudaya dan hak buday itu sendiri, serta mengakui hak-hak internasional dan hak-hak kemanusiaan lainnya. Nasionalisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Kebenerannya diikat oleh sebuah kesatuan yang kokoh, melalui persamaan sejarah sebagai penghuni gugus bangsa yang pernah dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain, dalam hal ini Belanda dan Jepang.

1. Faktor yang dapat memunculkan politik identitas pada pemilihan Presiden Tahun 2024

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam studi pasca kolonial, pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama. Politik identitas di pahami bahwa dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat

dalam praktik politik mengalami kemajuan. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang di Indonesia melalui agenda besar bernama PILPRES. Salah satu pakar politik yang bernama Donald L Morowitz merupakan salah satu pakar politik berasal dari Universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja yang akan di ikut sertakan dan siapa yang akan di tolak.

Banyaknya identitas yang berada di berbagai lingkungan membuat terjadinya hal-hal yang memungkinkan rentan terjadi konflik yang disebabkan hanya permasalahan tentang perbedaan. Hal itulah yang sering terjadi berada di sekitar kita dan perlunya gagasan dalam menyikapi perkembangan politik identitas Hubungan untuk saling berinteraktif terhadap perbedaan antar golongan maupun antar kelompok, seperti antar etnis, antar suku, antar agama, hingga antar ras yang dapat disebut dengan menumbuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi dapat dikategorikan sebagai salah satu gagasan dalam menghadapi perkembangan politik identitas pada saat ini. Sikap toleransi tersebut dapat diterapkan di berbagai bidang seperti toleransi politik, toleransi budaya, toleransi sosial, dan lainnya. Sikap toleransi dalam berpolitik ini memungkinkan dapat diterapkan di negara yang penduduknya memiliki berbagai identitas yang berbeda atau negara majemuk (multikulturalisme) dan juga dapat diterapkan di negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam menanamkan sikap toleransi politik dapat disebutkan yaitu faktor pada psikologi politik, penerapan sistem politik, struktur politik yang kokoh, serta meningkatnya kemakmuran perekonomian dari negara tersebut. Faktor yang berhubungan terhadap Politik Identitas di Indonesia salah satunya adalah Perseteruan antara Nasionalisme dan Agama Seperti yang

diketahui bahwa beragam isu-isu politik identitas yang terjadi hanya karena berasal dari keinginan dari tiap masyarakat berdasarkan pemikirannya sendiri. Hal itu terjadi di Indonesia, di mana ada dua kubu masyarakat yang melakukan perselisihan terhadap pemikiran yang mereka miliki, yaitu antara masyarakat yang mengukung identitas nasionalisme dengan yang mengukung identitas agama. Padahal, landasan keagamaan merupakan sebagai bukti dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam terbentuknya landasan negara Indonesia yaitu Pancasila yang terdapat pada sila ketuhanan.

Pemikiran nasionalisme ini dapat diartikan sebagai semangat jiwa kebangsaan dan cinta tanah air. Di Indonesia, nasionalisme dapat dikategorikan sebagai jiwa persatuan dan kesatuan antar suku, agama, ras, etnis, golongan, dan sebagainya. Dibuktikan ketika pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana mereka bersatu teguh dan bekerja sama untuk melawan para penjajah yang ingin menguasai wilayah Indonesia tersebut. Sampai akhirnya, mereka bisa bekerja sama dengan baik hingga terciptanya kemerdekaan Indonesia. Namun, saat ini perlu diketahui bahwa nasionalisme lebih diganggu oleh kumpulan dari kaum minoritas yang merasa tertindas dan terintimidasi. Perseteruan ini terjadi disebabkan hanyalah kepentingan dari elit-elit politik yang lebih mementingkan urusan politiknya demi merebut maupun mempertahankan sebuah kekuasaan di negara tersebut. Hal itu mereka lakukan dengan cara menggunakan identitas keagamaan yang dijadikan sebagai alat propaganda politik dan perebutan kekuasaan. Dengan begitu akan berakibat ke dalam hal-hal yang hanya dijadikan alat saja atau memanipulasi masyarakat Indonesia melalui propaganda mereka yang ganggu. Isu-isu ini lebih sering terjadi pada masa pemilihan umum yang merupakan sebagai kesempatan bagi di

antara mereka untuk berani menyuarakan terhadap senjata utama yang mereka bawa yaitu melakukan penggiringan opini tentang identitas lawan demi menjatuhkan lawan dari politik. Hal ini yang kemudian berdampak terjadinya perpecahan antara identitas nasionalisme dan keagamaan yang dapat merusak nama baik ideologi Pancasila. Politik identitas secara umum adalah cara anggota di masyarakat yang menunjukkan diri berjuang dengan tujuan mendapatkan pengakuan publik atas budaya yang dimiliki serta identitas kelompok tersebut. Identitas yang dimaksud adalah keseragaman agama, etnis, budaya, suku, dan lainnya. Contoh politik identitas pada masyarakat sebenarnya sudah lama diterapkan bahkan jauh sebelum ada kata politik identitas sendiri. Istilah politik identitas sendiri pertama kali disebutkan pada tahun 1974 oleh Barbara Smith seorang wanita kulit hitam dan Combahee River Collective yang mulai menyuarakan identitas mereka sebagai wanita kulit hitam dan sebagai anggota masyarakat.

Contoh Politik Identitas yang Ada di Dunia yaitu:

1. Politik Identitas Rasial

Contoh politik identitas yang pertama adalah secara rasial dan etnokultural. Jenis politik identitas ini sempat memuncak di Amerika Serikat pada abad ke-19 pada masa Sistem Partai Kedua dan Sistem Partai Ketiga. Politik identitas rasial ini menjadi topik utama di Amerika sejak aturan perbudakan dihapuskan. Kemudian politik identitas ini kembali ramai pada abad ke-21 sebagaimana terpilihnya Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat.

2. Politik Identitas Gender

Politik identitas gender juga menjadi salah satu topik yang masih diperjuangkan oleh banyak orang. Dengan adanya representasi dari gender yang setara dalam ranah politik membuat masyarakat merasa memiliki alat sebagai tempat mereka bersuara dan didengar secara luas.

3. Politik Identitas Maori

Di Selandia Baru sendiri politik identitas antar suku pan-Maori sempat menjadi masalah dalam politik Selandia Baru secara keseluruhan karena adanya persaingan yang jelas pada non-Maori. Akademis Alis Jones pernah menyatakan bahwa politik identitas pan-Maori yang jelas berlawanan langsung dengan Pakeha atau orang kulit putih di Selandia Baru membantu membuat “dasar untuk kolaborasi internal dan pihak politik kekuatan.”

4. Politik Identitas Kulit Putih

Jenis politik identitas kulit putih memuncak setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45. Politik identitas ini meningkat pada ranah politik terlebih lagi pada Partai Republik. Sebelumnya, pada tahun 1998 Jeffrey Kaplan dan Leonard Weinberg telah memprediksi akan ada lonjakan pada politik identitas ras kulit putih pada akhir abad ke-20 yang membuat narasi mengenai keluhan populis dan akan mendorong agenda permusuhan terhadap ras lain non-kulit putih.

5. Politik Identitas Pemilu Indonesia

Untuk Indonesia sendiri, politik identitas dalam pilkada sangat ramai bisa dibilang ramai dengan dasar agama dan suku di Indonesia. Di Indonesia sendiri juga, politik identitas jadi bagian dari kampanye saat pemilihan umum. Sehingga rasanya Anda mungkin sudah pernah melihat atau merasakan langsung dari dampak politik identitas ini dalam beberapa orang. Dengan memahami contoh politik identitas seperti di atas mungkin Anda sudah dapat menyimpulkan bahwa, politik identitas sendiri bisa menjadi ancaman bukan hanya Indonesia tapi berbagai negara dengan basis demokrasi. Kontroversi terkait politik identitas sebenarnya berawal dari perbedaan dalam memahami konsep dan menempatkan konteks. Konteks ini mencakup konteks ruang, waktu, dan kondisi yang melatari. Sebagai suatu konsep, politik identitas tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, sebab kontekslah yang bisa menjadi acuan pemaknaan dan pemahaman atas suatu

konsep. Mengabaikan konteks dari konsep politik identitas sama saja dengan melahirkan pemahaman baru yang keliru dan sesat terhadap konsep tersebut.

Bidang ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai merknya.

Politik identitas biasanya dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marjinal dalam upaya melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Dalam menyuarakan aspirasi kelompok pengusung politik identitas, distingsi seperti kesukuan, gender dan agama ditunjukkan secara eksplisit dan intensif. Beberapa contoh politik identitas melalui gerakan sosial politik dapat ditemukan di dalam maupun luar negeri antara lain: gerakan Afro-Amerika yang mengklaim persamaan ras, gerakan LGBT yang menuntut legalitas *same sex marriage* di beberapa negara Barat, gerakan kelompok adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah ulayat, gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan, dan lain lain. Dari ilustrasi di atas, dapat ditarik kesamaan bahwa: pertama, politik identitas memuat makna dan tujuannya masing-masing, sesuai konteks geografis, kultural, temporal, maupun sosialnya. Kedua, gerakan politik identitas diusung oleh kelompok yang termarginalisasi atau tidak mendapatkan hak yang setara dengan kelompok *mainstream*.

Sejumlah tulisan opini terkait politik identitas di Indonesia, terdapat sejumlah kesalahpahaman konseptual yang perlu diklarifikasi, antara lain: (1) Politik identitas bisa dimainkan oleh kelompok mayoritas, (2) Politik kebangsaan juga mengusung politik identitas, dan (3) Politik praktis sebenarnya juga merupakan politik identitas. Klarifikasi dari kesalahpahaman

di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, politik identitas tidak lazim dimainkan oleh kelompok mayoritas yang sebenarnya memiliki akses lebih atau bahkan *privilege* dibandingkan kaum minoritas. Perlu dicatat, politik identitas oleh kelompok minoritas kerap memanfaatkan dan memperlihatkan posisi sebagai korban (*playing victim*) dari sistem yang represif yang dijalankan oleh kelompok mayoritas. Bagaimana mungkin kelompok mayoritas dengan *privilege* kemudian mem-*frame* diri sebagai korban? *Kedua*, politik identitas berbeda dengan politik kebangsaan. Politik kebangsaan memahami keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas. Namun, haluan politik ini bertujuan untuk mengakomodasi agar kedua kelompok menjadi inklusif. Hal ini berbeda dengan politik identitas, dimana salah satu kelompok menuntut hak eksklusif. Kacamata politik kebangsaan, keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah di atas segalanya. Setiap warga dari latar belakang sosial, kultural, agama apapun memiliki hak dan kewajiban yang setara untuk berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya, dalam perspektif politik identitas, pemenuhan hak satu kelompoklah yang menjadi tujuan utamanya, yang justru bisa menimbulkan ketegangan atau bahkan perpecahan antar kelompok. *Ketiga*, politik praktis belum tentu membawa politik identitas. Adalah sebuah fitrah bahwa pelaku politik praktis adalah anggota masyarakat dengan kesamaan identitas tertentu, misal: kesamaan visi misi politik, kesamaan geografis, kesamaan agama, dll. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan setiap praktik politik sebagai gerakan politik identitas.

ketika afiliasi kesukuan, keagamaan, atau ras dijadikan komoditas untuk memobilisasi pengaruh perilaku pemilih. Preferensi objektif terhadap calon pemimpin yang memiliki kapasitas mumpuni kemudian menjadi terdistorsi oleh sentimen kesukuan atau keagamaan itu. Sebagai contoh, calon pemimpin yang tidak kompeten namun seiman lebih dipilih daripada calon pemimpin yang kompeten

tapi berbeda keyakinan. Acapkali, politik identitas memanipulasi doktrin agama untuk mendiskriminasi dan menyudutkan pemilih seagama yang menyalurkan aspirasi politik yang berbeda.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu pasti terjadi interaksi di antara sesama. Setiap individu pasti menginginkan kesejahteraan, yang bisa didapat dengan berbagai cara, dan sesungguhnya kesejahteraan bagi tiap-tiap individu itu relatif. Namun, dalam prosesnya pasti tidak seluruh posisi bisa ditempati oleh setiap individu, maka dari itu terdapat persaingan menuju kesejahteraan itu, dalam hal ini berubah menjadi sebuah tujuan dasar yang hendak dicapai. Tujuan dapat dicapai melalui berbagai cara, namun usaha untuk menduduki suatu posisi agar dapat memiliki kewenangan dalam menata sebuah sistem dari skala yang lebih besar demi mewujudkan kepentingan serta cita-cita tertentu, itulah yang dapat dikatakan sebagai politik. Sederhananya, politik dapat ditemukan dalam berbagai unsur dan tingkatan di keseharian masyarakat.

Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warganegara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Mengkaji politik dari segi pemerintahan dan kepentingan suatu negara. Setiap negara jelas memiliki warga agar dapat berdaulat, setiap warga memiliki identitas masing-masing yang membedakan antar individu. Identitas pada hakekatnya adalah cerminan diri sendiri yang menjadi pembeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional adalah karakter yang menjadi jati diri sebuah bangsa, beserta pemahaman kehidupan bernegara dan pengetahuan yang adadi dalamnya. Identitas ada pada setiap manusia, begitu pula politik yang mengalir dalam kehidupan bermasyarakat, maka ada yang dinamakan dengan politik identitas, dan penting untuk mengetahuinya karena berhubungan dengan situasi politik beberapa tahun terakhir. Politik Identitas pada dasarnya adalah situasi dan cara

berpolitik yang mempersatukan kelompok karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan latar belakang golongan, contohnya suku, ras, agama, dan jender. Pada dasarnya identitas bukan hanya soal sosiologis tetapi juga bisa masuk ke ranah politik. Dalam teorinya, politik identitas dapat berpengaruh baik dan buruk, ibarat pedang bermata dua dalam republik yang berbhinneka ini. Sebagai contoh, pembentukan partai berbasis agama yang menjunjung kepentingan agama serta berjalan searah dengan Pancasila dapat dikatakan sebagai bentuk demokrasi yang bagus di era reformasi. Serta, kepala daerah yang dipilih di daerah tertentu akan mudah memenangkan kontestasi demokrasi jika seetnis dengan para pemilihnya. Kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang, seakan terwujud dengan lahirnya gerakan-gerakan yang didasari oleh suku, agama, jender, dan lain sebagainya.

Indonesia adalah negara yang multikultural dengan berbagai etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Menurut data sensus BPS tahun 2010, terdapat 1211 bahasa yang terdaftar di Indonesia, yang mana 1158 di antaranya adalah Bahasa daerah. Dari sumber yang sama pula, teridentifikasi 1340 suku di Indonesia, dimana suku Jawa menempati posisi pertama dalam hal jumlah yang mencapai 41% dari total populasi negara ini. Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui enam kepercayaan resmi yaitu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu agar tercantum di Kartu Tanda Penduduk masing-masing warga negara. Data-data tersebut sudah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dari segi apapun. Namun, segala sesuatu yang berlebihan dapat dikatakan kurang baik, karena berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan dan kebencian dalam kehidupan bermasyarakat. Buktinya, di Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kinerjanya diakui baik dalam dan luar

negeri saja masih bisa dikalahkan oleh isu-isu yang berbau SARA.

Segregasi sosial yang terjadi secara horizontal membuat masyarakat hidup dalam stigmakita dan mereka, atau saya dan dia, yang membuat alam bawah sadar mengkotak-kotakkan setiap individu atau kelompok. Eksklusifitas yang ekstrim, isolasi terhadap budaya yang berbeda, serta menyalahkan kelompok yang tidak sepaham adalah contoh-contoh dari politik identitas yang berlebihan, dan tidak memberi pengaruh baik dalam negara yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini. Berpotensi terjadi kedepannya adalah pemimpin tidak lagi diadu sesuai kinerja nyata, akan tetapi dengan bermodalkan latar belakang, minoritas akan merasa tersingkirkan, serta struktur politik akan menjadi semu dengan adanya tekanan dari pihak mayoritas. Sekarang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa bisa meyakinkan masyarakat bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan baik bukan dilawan. Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat. (Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 4, No. 2 (2019) 187-217 DOI:

<http://dx.doi.org/10.21580/jish.42.5223>).

KESIMPULAN

Politik identitas seringkali disalahpahami sebagai bagian dari politik praktis atau bahkan merupakan politik kebangsaan. Memang, kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi anggota suatu kelompok (in group unity). Namun, dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, menonjolkan identitas kelompok

secara dominan justru dapat menjadi potensi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa (nation unity). Disinilah pembeda antara politik identitas dengan politik kebangsaan, sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompoknya sendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan inklusif bagi kehidupan bersama. Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Aldho Faruqi Tutukansa, 2019, “Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia”.
- Andhika, L. R. (2021). Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(1), 87–102.
- Andre Pebrian Perdana (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance- Jurnal Kelitbangan. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*
- Dyah ochtorina.dkk. 2018. Penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan Zharfandy, 2016, “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”.
- Leli Salman Al-Farisi, 2018, “Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila” ISSN 2087-2208.
- Muhammmad Kadafi, dkk.. “Metodologi Penelitian Hukum”. (Medan. Perdana Publishing. 2016).
- Soejono Soekanto. 2010. “sosiologi hukum”. Genta Publshing. Yogyakarta.
- Wening Purbatin Palupi Soenjoto, 2019, “Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas
- Politik Padagenerasi Mileneal Indonesia Di Era”4.0 *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 4, No. 2 (2019) 187-217.
- Widyawati, 2021, “Menguatnya Politik Identitas Di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis”.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. INTERNET

- <https://politik.rmol.id/read/2022/10/22/551643/jelang-pemilu-2024-waspada-ancaman-politik-identitas-dan-resesi-global>
- <https://sulteng.antaranews.com/berita/255409/guru-besar-uin-palu-ingatkan-dampak-politik-identitas-pecah-persatuan>
- <https://www.jernih.id/contoh-politik-identitas-pada-masyarakat>
- <http://lipi.go.id/publikasi/politik-identitas/32563>
- <https://www.uinjkt.ac.id/kesalahpahaman-tentang-politik-identitas/>

Halaman Kosong